

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
5. Metode Penelitian	8
a. Tipe Penelitian	8
b. Pendekatan Masalah	9
c. Sumber Bahan Hukum	9
d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	10
6. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN HUKUM PENGATURAN PPN DAN PPh PASAL	
23 TERKAIT PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA	
DAN PEMBORONGAN PEKERJAAN	14
1. Aspek Hukum Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dan	
Perusahaan Pemborongan Pekerjaan	14
a. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang	
Ketenagakerjaan	14
b. Menurut Permenakertrans Nomor 19 tahun 2012 Tentang	
Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan	
Kepada Perusahaan Lain	21
2. Aspek Hukum Pajak Pertambahan Nilai Terkait Dengan	
Perusahaan Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan Perusahaan	
Pemborongan Pekerjaan	25
a. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009	
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun	
1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa	
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	25

b. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2012 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai	31
3. Aspek Hukum Pajak Penghasilan Terkait dengan Perusahaan Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan Perusahaan Pemborongan Pekerjaan	34
a. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan	34
b. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	38
c. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	41

BAB III IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PPN DAN PPh PASAL 23

TERHADAP PERUSAHAAN TERHADAP PENYEDIA JASA PEKERJA DAN PERUSAHAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN	44
1. Pembatasan Jenis Pekerjaan Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dan Akibat Hukum Bagi Perusahaan Pemborong Pekerjaan	44
a. Dasar Pengenaan PPN dan PPh Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Sebelum Berlakunya Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012	44
b. Dasar Pengenaan PPN dan PPh Setelah Berlakunya Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012	50
2. Solusi Penyelesaian Atas Perbedaan Dasar Pengenaan Pajak Terhadap Pemborongan Pekerjaan	55

BAB IV PENUTUP	65
1. Kesimpulan	65
2. Saran	66
DAFTAR BACAAN.....	xi